



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	10 (sepuluh)
Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/BKPM.
Hari, Tanggal	:	Senin, 30 Agustus 2021
Pukul	:	10.00 WIB
Sifat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	GDE Sumarjaya Linggih, S.E, M.A.P, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	1. Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2020; 2. Progress Realisasi Anggaran TA. 2021; dan 3. Pembahasan RKA KL TA. 2022.
Hadir	:	1. 43 orang dari 54 Orang Anggota Komisi VI DPR RI; 2. a. Menteri Investasi/BKPM, ; b. Bapak/Ibu pendamping yang sudah bergabung di virtual beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/BKPM pada pukul 10.34 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/BKPM pada hari Senin, 30 Agustus 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, GDE Sumarjaya Linggih, S.E, M.A.P

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selama 13 (*tiga belas*) tahun berturut-turut dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2020.
2. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk meningkatkan capaian realisasi anggaran tahun 2021 mengingat penyerapan realisasi anggaran Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2021 per 27 Agustus 2021 baru mencapai sebesar Rp374.504.097.307 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Lima Ratus Empat Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah*) dari alokasi anggaran sebesar Rp834.778.720.000 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) atau sebesar 44.86%.
3. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2022 sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS No. S-634/MK.02/2021 dan No. 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 sebesar Rp711.513.546.000 (*Tujuh Ratus Sebelas Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*) yang dialokasikan dalam 2 (dua) program antara lain :
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp300.901.232.000 (*Tiga Ratus Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*).
 - b. Program Penanaman Modal sebesar Rp410.612.314.000 (*Empat Ratus Sepuluh Miliar Enam Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*).
4. Komisi VI DPR RI menyetujui pengajuan penambahan Pagu Anggaran Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2022 sesuai Surat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.1018/A.1/2021 tanggal 7 Mei 2021 kepada Menteri Keuangan sebesar Rp600.000.000.000 (*Enam Ratus Miliar Rupiah*) yang akan digunakan sebagai berikut:
 - a. Peta peluang investasi dengan usulan anggaran Rp95.000.000.000 (*Sembilan Puluh Lima Miliar Rupiah*).
 - b. Relokasi perusahaan asing ke Indonesia dengan usulan anggaran Rp140.000.000.000 (*Seratus Empat Puluh Miliar Rupiah*).
 - c. Eksekusi realisasi investasi bagi perusahaan penerima fasilitas penanaman modal dengan usulan anggaran Rp110.000.000.000 (*Seratus Sepuluh Miliar Rupiah*).

- d. Eksekusi realisasi investasi mangkrak dengan usulan anggaran Rp120.000.000.000 (*Seratus Dua Puluh Miliar Rupiah*).
 - e. Peningkatan investasi baru dengan usulan anggaran Rp85.000.000.000 (*Delapan Puluh Lima Miliar Rupiah*).
 - f. Satgas percepatan investasi dengan usulan anggaran Rp50.000.000.000 (*Lima Puluh Miliar Rupiah*).
5. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

Catatan Rapat:

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan melakukan audit internal terkait kapasitas produksi pabrik-pabrik semen, dibandingkan dengan realisasi produksi dan dikaitkan dengan permintaan pasar.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.25 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**



GDE Sumarjaya Linggih, S.E, M.A.P. 
A-327